

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan kegiatan perpindahan manusia dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan suatu kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Peran transportasi sangatlah penting dalam menunjang *mobilitas* manusia dimana pada zaman sekarang manusia lebih memilih menggunakan transportasi untuk mencapai ke tempat yang dituju dibandingkan berjalan kaki atau menggunakan sepeda, hal ini dikarenakan optimalisasi waktu dimana dengan menggunakan transportasi akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan, selain itu transportasi juga mendukung kegiatan pendistribusian barang baik kegiatan *eksport* maupun *import* serta mendukung pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau untuk menarik minat masyarakat Indonesia menggunakan jasa transportasi.

Maka dari itu peran pemerintah disini sangat dibutuhkan dalam hal ini yaitu sebagai penyedia transportasi yang memadai, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 139 ayat 3 yang berbunyi "Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota", perlu digaris bawahi bahwa penyedia angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat menjadi PR penting bagi pemerintah saat ini khususnya sendiri pemerintah Kota Palangka Raya. Sebagai kota yang menjadi pusat kegiatan baik pemerintahan maupun aktivitas jasa dan perdagangan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas wilayah 2.852,12 km² dan populasi sebesar 295.677 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2023) , Kota Palangka Raya yang memiliki kawasan industri berdampak terhadap tingginya pergerakan manusia dimana pada setiap tahunnya jumlah kepemilikan kendaraan terus bertambah dengan tingkat

pertumbuhan rata-ratanya mencapai 4% per tahunnya (Tim PKL Kota Palangka Raya, 2023). Tingginya pergerakan masyarakat di Kota Palangka Raya tidak didukung oleh tersedianya sarana angkutan umum yang memadai. Berdasarkan hasil survei inventarisasi sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh Tim PKL Kota Palangka Raya tahun 2023 angkutan di Kota Palangka Raya hanya terdapat 5 trayek angkutan kota dengan jumlah armada yang beroperasi sebanyak 86 armada berdasarkan data yang diperoleh dari (Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya), namun pada keadaan eksisting jumlah armada yang beroperasi di Kota Palangka Raya hanya sebanyak 47 armada (Hasil Analisis Tim PKL Kota Palangka Raya Tahun 2023) dengan minimnya jumlah armada yang beroperasi dan minat masyarakat menggunakan angkutan umum masih sangat sedikit yaitu hanya 1 % (Hasil Analis Tim PKL Kota Palangka Raya) menyebabkan cakupan wilayah terlayani angkutan umum di Kota Palangka Raya hanya sebesar 56%. Selain itu mobilitas di Kota Palangka Raya yang didominasi oleh pengguna angkutan pribadi menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Palangka Raya yang mana persentase pengguna angkutan pribadi sebesar 76 % (Hasil Analisis Tim PKL Kota Palangka Raya 2023).

Dengan kondisi armada yang tidak memenuhi standar baik dari kinerja jaringan maupun dari kinerja operasional yang mana pada parameter pelayanan angkutan umum contohnya sendiri yang dapat diukur oleh masyarakat yaitu kondisi fisik armada masih belum ada peremajaan terhadap armadanya dimana kondisi angkutan umum di Kota Palangka Raya rata-rata umur kendaraannya diatas 22 tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek standar umur kendaraan maksimum adalah 20 tahun. Buruknya kondisi angkutan umum yang ada menyebabkan rendahnya demand aktual yang ada karena masyarakat Kaota Palangka Raya lebih memilih menggunakan angkutan pribadi dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum.

Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah memerlukan perencanaan sistem transportasi dengan pelayanan angkutan modern,

sebagai landasan dasar untuk pemenuhan kebutuhan angkutan masyarakat yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Disisi lain pihak perusahaan angkutan diharuskan mematuhi kewajiban untuk memenuhi 6 (enam) indikator standar pelayanan yang meliputi : keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteranturan yang mana tercantum dalam (Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan) . Maka dari itu dengan mengangkat permasalahan pada topik di atas penulis membuat penelitian dengan judul **“PERENCANAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN KONSEP BRT DI KOTA PALANGKA RAYA”** yang mana dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan akan berdampak baik terhadap peningkatan kinerja pelayanan angkutan umum di Kota Palangka Raya.

1.2 Identifikasi Masalah

Meninjau dari latar belakang yang telah digambarkan sebelumnya, permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil Analisis PKL Kota Palangka Raya 2023, mobilitas masyarakat di Kota Palangka Raya didominasi menggunakan kendaraan pribadi sebesar 99% dengan persentase penggunaan angkutan umum sebesar 1% (Hasil Analisis tim PKL Kota Palangka Raya 2023).
2. Persentase Kinerja Angkutan Umum dengan cakupan wilayah terlayani hanya 56% yaitu 10 zona yang terlayani angkutan umum, dan masih ada 8 zona atau 44% yang belum terlayani angkutan umum (Hasil Analisis tim PKL Kota Palangka Raya 2023), sehingga perlu adanya penambahan rute baru angkutan umum agar 18 zona yang ada di Kota Palangka Raya dapat terlayani oleh angkutan umum.
3. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kota Palangka Raya yang didominasi oleh pengguna kendaraan pribadi seperti sepeda motor dengan persentasenya yaitu sebesar 76% (Hasil analisis tim PKL Kota Palangka Raya 2023).
4. Parameter pelayanan angkutan umum yang dapat diukur oleh masyarakat contohnya adalah kondisi fisik armada angkutan umum yang masih belum adanya perawatan terhadap armadanya dimana pada

5. kondisi eksisting angkutan umum di kota Palangka Raya rata-rata usianya >20 tahun (Standar PM 98 Tahun 2013 (20 tahun), rendahnya *load factor* (<70%) standar Bank Dunia.
6. Besaran Tarif angkutan umum di Kota Palangka Raya sudah di atur oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya baik untuk pelajar ataupun untuk masyarakat umum, namun pada kondisi *eksisting* penumpang harus membayar tarif berdasarkan jarak. Semakin dekat jarak menggunakan angkutan umum, maka tarifnya akan sedikit. Begitupun sebaliknya, semakin jauh jarak, maka tarif akan semakin mahal.

1.3 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah setelah meninjau identifikasi masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Berapa *demand potensial* angkutan perkotaan dengan konsep *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana penentuan Rute *Bus Rapid Transit* (BRT) yang akan direncanakan di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana Rencana Kinerja Operasional yang akan diterapkan pada *Bus Rapid Transit* (BRT) sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan angkutan massal perkotaan di Kota Palangka Raya?
4. Bagaimana titik lokasi halte yang sesuai dengan pengoperasian *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kota Palangka Raya?
5. Bagaimana terkait penjadwalan *Bus Rapid Transit* (BRT) di kota Palangka Raya?
6. Berapa Biaya Operasional Kendaraan dan tarif yang sesuai apabila *Bus Rapid Transit* (BRT) dioperasikan?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dengan perencanaan pengoperasian sistem angkutan massal umum berbasis jalan *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menentukan banyaknya jumlah permintaan masyarakat terhadap angkutan massal berbasis jalan *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kota Palangka Raya.
2. Merencanakan rute yang akan dilalui oleh angkutan massal berbasis jalan *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kota Palangka Raya.
3. Menentukan Rencana Kinerja Operasional yang akan diterapkan pada angkutan BRT guna meningkatkan pelayanan *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kota Palangka Raya.
4. Menentukan titik lokasi halte yang sesuai dengan pengoperasian *Bus Rapid Transit* (BRT).
5. Menentukan analisis terkait penentuan penjadwalan operasi untuk *Bus Rapid Transit* (BRT) di Kota Palangka Raya.
6. Melakukan analisis penentuan Biaya Operasional Kendaraan yang sesuai apabila *Bus Rapid Transit* (BRT) dioperasikan.

1.5 Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian, perlu adanya ruang lingkup pembahasan atau batasan masalah, hal tersebut dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran yang dituju. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi studi yang diambil hanya cakupan wilayah Kota Palangka Raya
2. Analisis Operasional *Bus Rapid Transit* di Kota Palangka Raya
3. Penelitian ini hanya terbatas pada perencanaan *Bus Rapid Transit* (BRT) tidak pada perencanaan angkutan feedernya.
4. Penelitian ini hanya membahas mengenai tarif dan Biaya Operasional Kendaraan saja, tidak membahas sampai ATP, WTP dan Subsidi.
5. Menganalisis *potensial demand* dengan menggunakan software pada aplikasi PTV Vissum.
6. Titik lokasi halte yang sesuai dengan pengoperasian *Bus Rapid Transit* (BRT)